



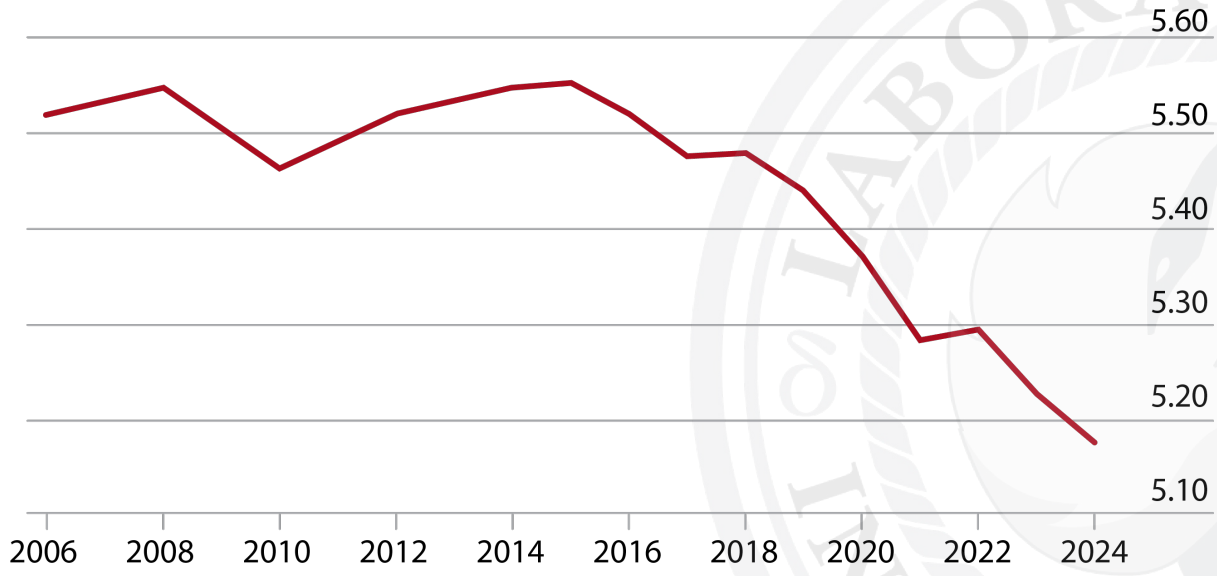
Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045:

Pasang Surut Demokrasi dan Partai Politik

Jakarta, 20 Agustus 2025

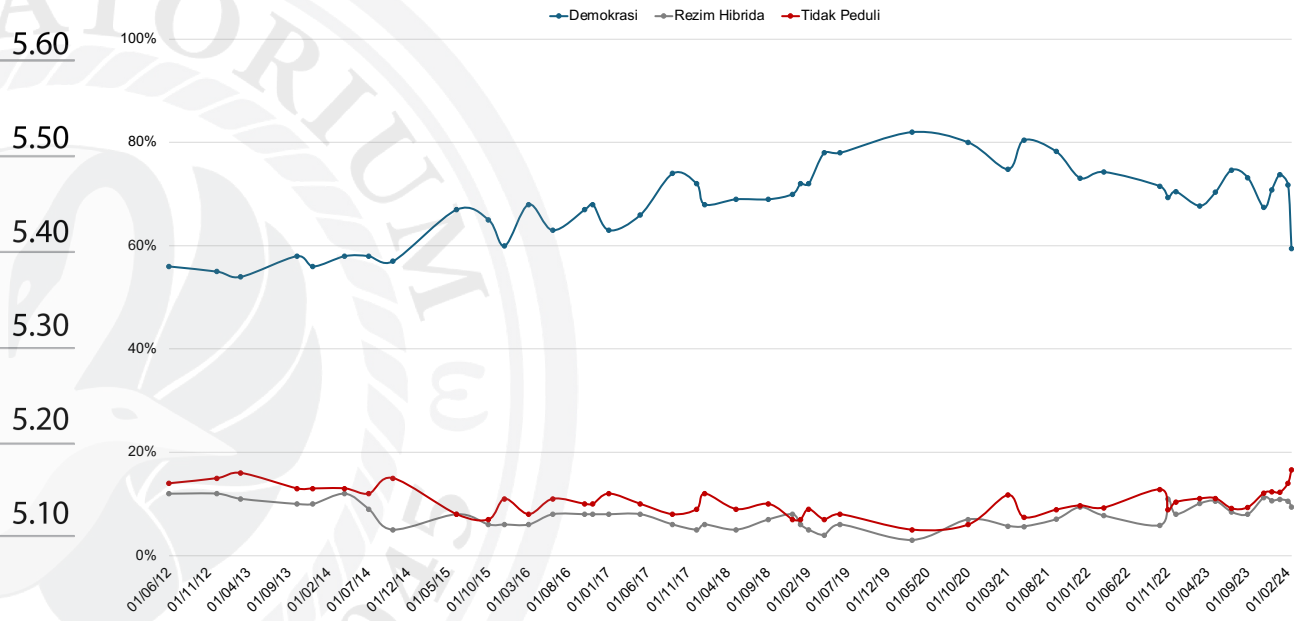
Latar Belakang

Tren Rerata Indeks Demokrasi Dunia



Sumber: EIU, 2025

Tren Kepercayaan Publik atas Sistem Pemerintahan Indonesia



Sumber: Survei SMRC, 2024

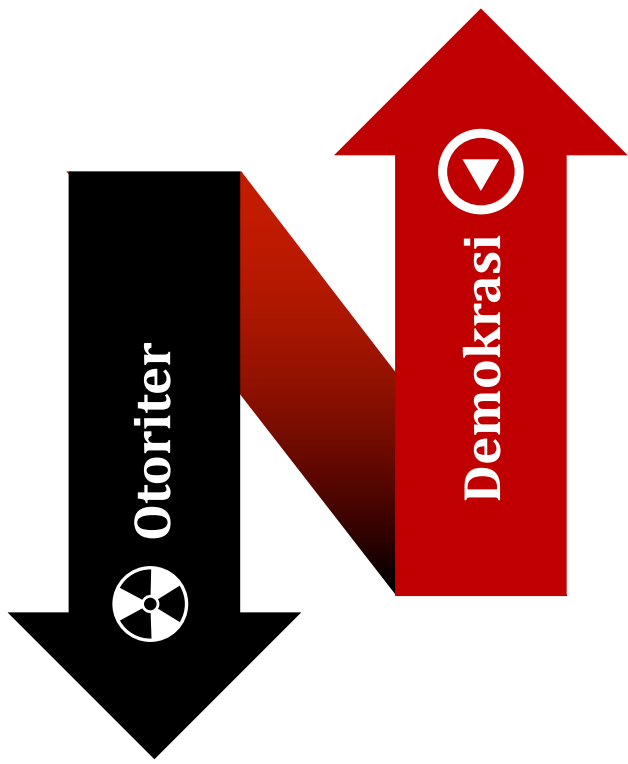
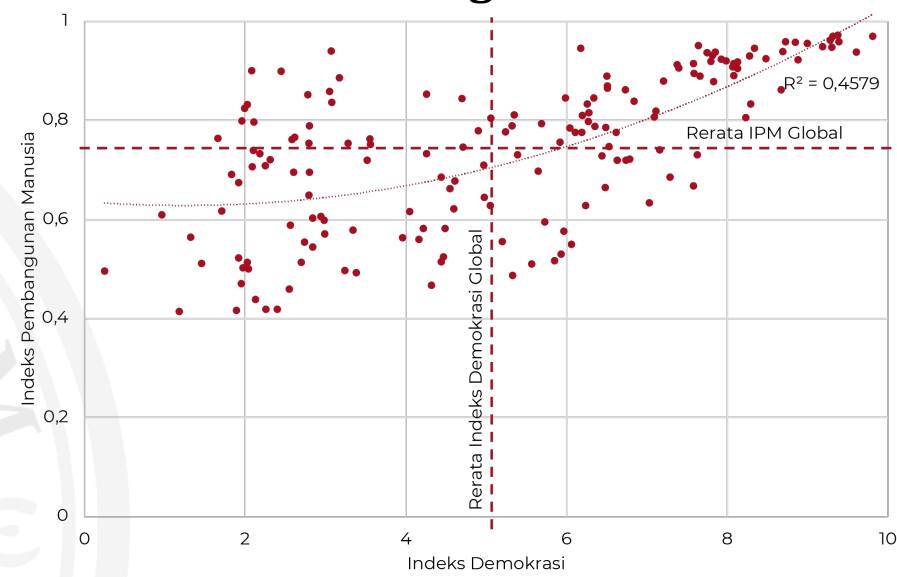
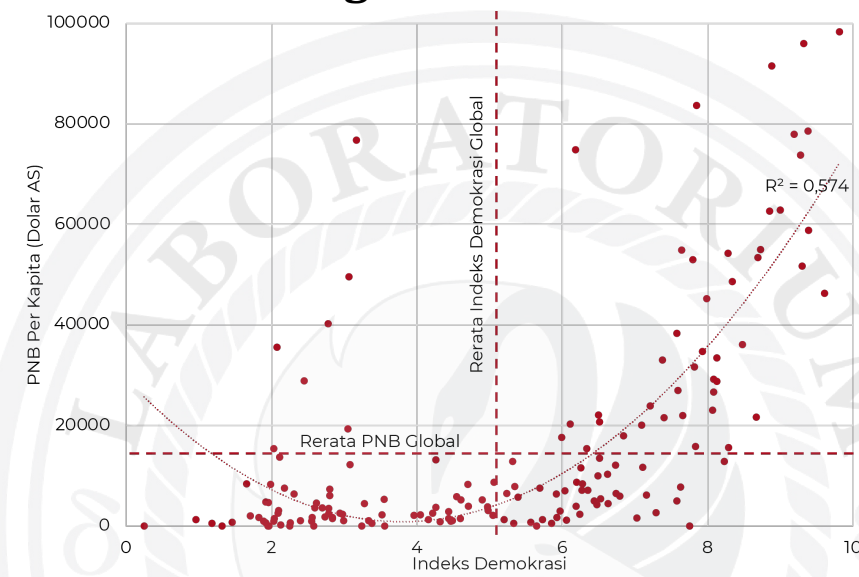
Menguatnya Sentimen Populisme (anti-pluralist)

Memanipulasi Norma Demokrasi

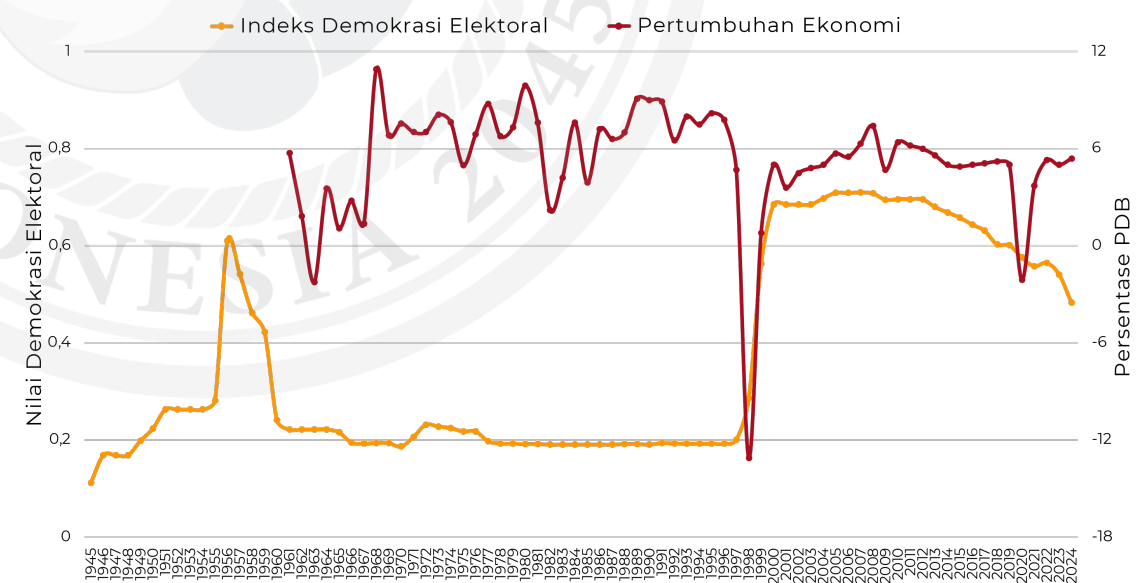
Otoritarianisme Kompetitif

Urgensi

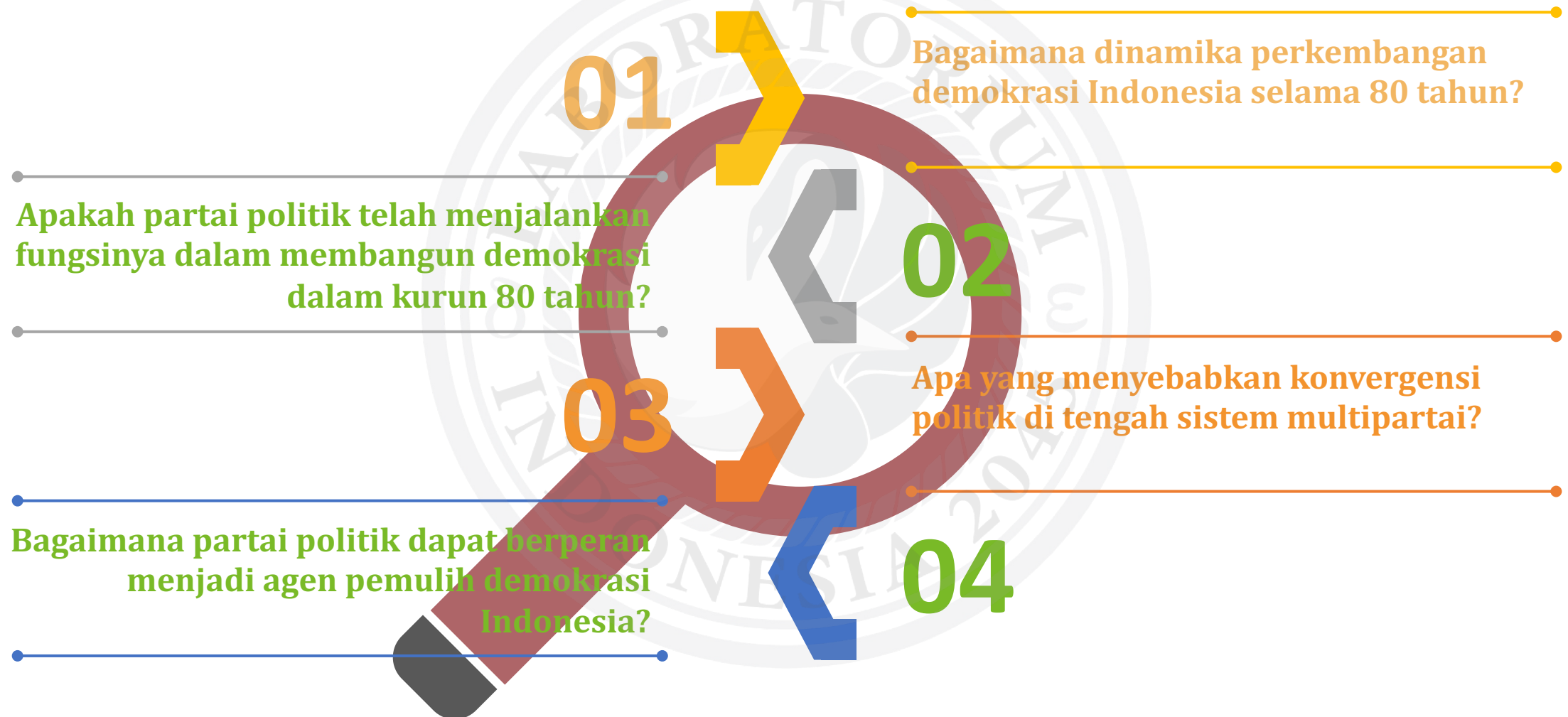
Perbandingan Indeks Demokrasi dan Indikator Pembangunan Global



Tren Indeks Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Pertanyaan Penelitian



Telaah Gagasan

Demokrasi

Sistem pemerintahan yang menghendaki pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil serta menjamin akses setara dan kebebasan masyarakat terhadap institusi politik.



Partai Politik

Partai politik menduduk posisi sentral sebagai wadah penghubung antara masyarakat sipil dengan negara. Hal tersebut terefleksikan oleh enam fungsi utama partai politik, yakni 1) artikulasi kepentingan; 2) agregasi kepentingan; 3) komunikasi politik; 4) memobilisasi dan mendorong partisipasi politik; 5) rekrutmen dan nominasi; dan 6) membentuk pemerintahan yang efektif.

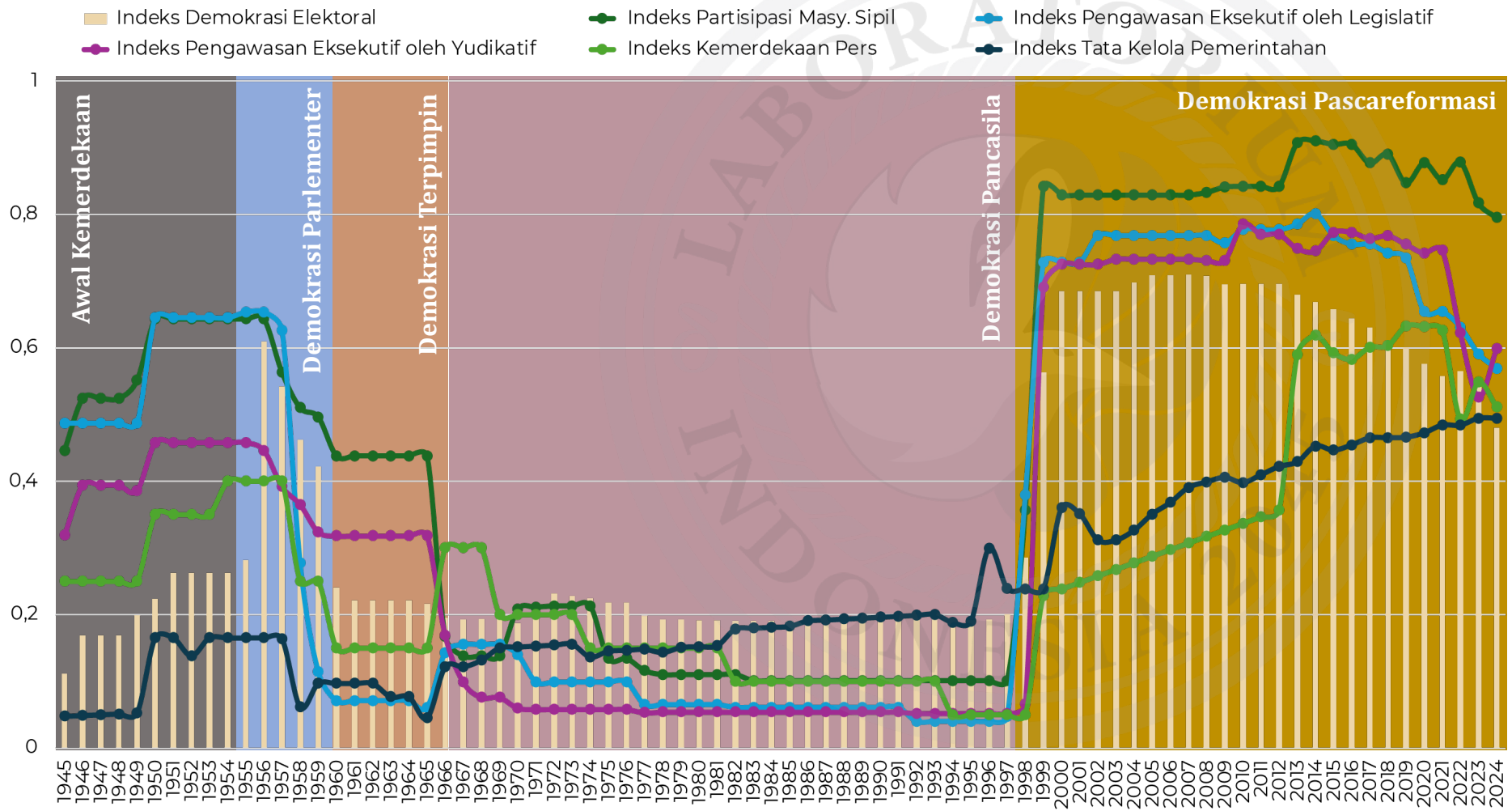


Signifikansi antara Indeks Demokrasi dan Indeks Lainnya

Variabel	Data	Subjek	Koefisien (R ²)
Dependen	Indeks Demokrasi Elektoral	Demokrasi	-
Independen	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	Pilar Eksekutif	0,6601
Independen	Indeks Pengawasan Eksekutif oleh Legislatif	Pilar Legislatif	0,8262
Independen	Indeks Pengawasan Eksekutif oleh Yudikatif	Pilar Yudikatif	0,8789
Independen	Indeks Kemerdekaan Pers	Pilar Pers	0,4606
Independen	Indeks Partisipasi Masy Sipil	Pilar Masy. Sipil	0,8589
Independen	Indeks Pelembagaan Partai	Partai Politik	0,1259

Refleksi 80 Tahun Demokrasi Indonesia

Tren Indeks Demokrasi dan Lima Pilar Demokrasi

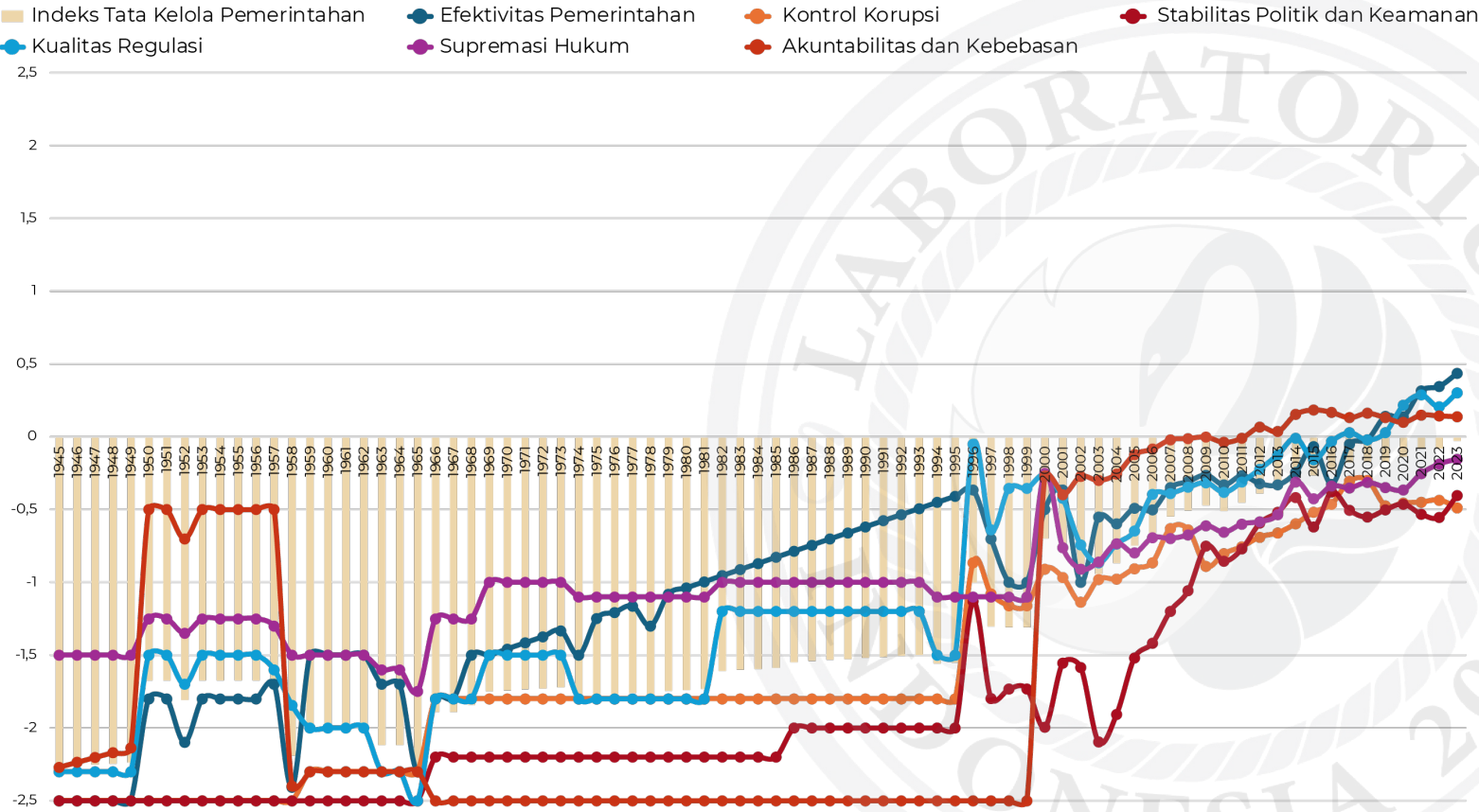


Selama delapan dekade, kualitas demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan eksekutif, di mana konsolidasi yang eksklusif cenderung menurunkan kualitas tata kelola, sementara konsolidasi yang inklusif mendorong perbaikan.

Elemen sipil tampil sebagai penyeimbang utama demokrasi dengan ketahanan yang sering kali lebih kuat dibanding lembaga formal. Sementara itu, kebebasan pers dibutuhkan dalam menjaga demokrasi sebagai penjamin keabsahan informasi.

Dinamika Pembangunan Pilar Eksekutif: Pilar Utama Demokrasi

Tren Indeks Tata Kelola Pemerintahan



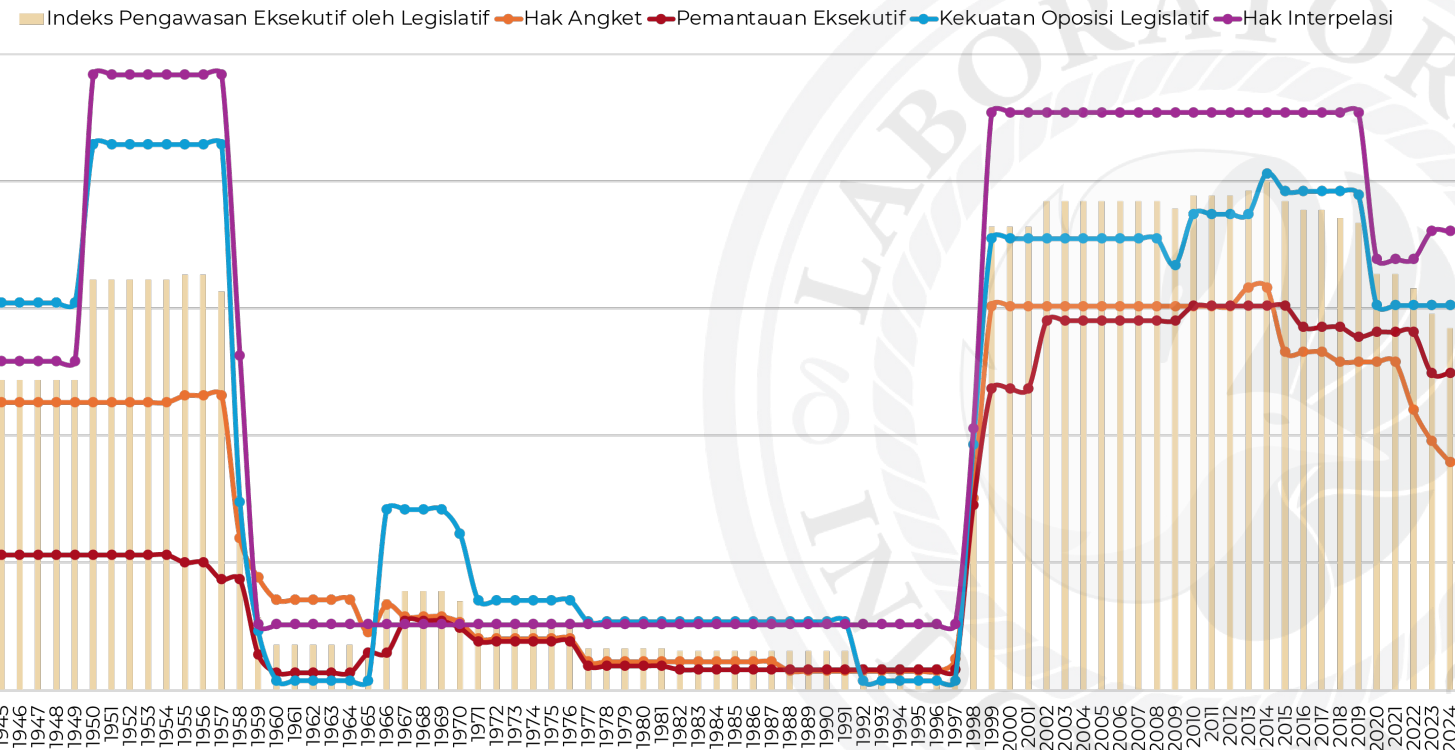
Pada awal kemerdekaan rerata nilai indeks tata kelola pemerintah masih berada dikisaran (-1,98) di mana pemerintahan belum berjalan optimal. Peningkatan mulai tumbuh pada periode demokrasi parlementer dengan rerata nilai (-1,85) berkat kebebasan berpendapat dan supremasi hukum berjalan lebih baik meskipun stabilitas politik dan efektivitas pemerintah masih tersendat akibat seringnya pembubaran kabinet oleh parlemen.

Namun, pada periode demokrasi terpimpin terjadi penurunan dengan rerata nilai sebesar (-2,09) yang diakibatkan oleh penerbitan kebijakan yang cenderung represif. Kebijakan tersebut memiliki implikasi negatif pada aspek kebebasan berpendapat, supremasi hukum, hingga kualitas regulasi.

Sementara itu, lompatan perbaikan terjadi pada demokrasi pancasila dengan rerata nilai indeks sebesar (-1,64). Sumbangsih terbesar diberikan oleh aspek pemerintahan yang efektif dan kualitas regulasi. Akan tetapi, peningkatan nilai tersebut perlu dibayar dengan dibungkamnya kebebasan berpendapat. Sedangkan pasca reformasi perbaikan sudah dilakukan pada seluruh aspek dengan perolehan rerata nilai sebesar (-0,47) selama hampir tiga dekade. Namun, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, yakni tingginya praktik korupsi dan kerentanan politik, serta independensi peradilan.

Dinamika Pembangunan Pilar Legislatif: Pilar Perimbangan

Tren Indeks Pengawasan Eksekutif oleh Legislatif



Kedua, subordinasi parlemen pada demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila. Rerata indeks terjun bebas pada tataran 0,07. Kemampuan parlemen dibatasi untuk menyelidiki atau mengoreksi eksekutif. Mekanisme musyawarah menggantikan voting, dan legislasi menjadi stempel keputusan presiden. Lebih lanjut, kooptasi total legislatif oleh eksekutif melalui serangkaian rekayasa regulasi-kelembagaan.

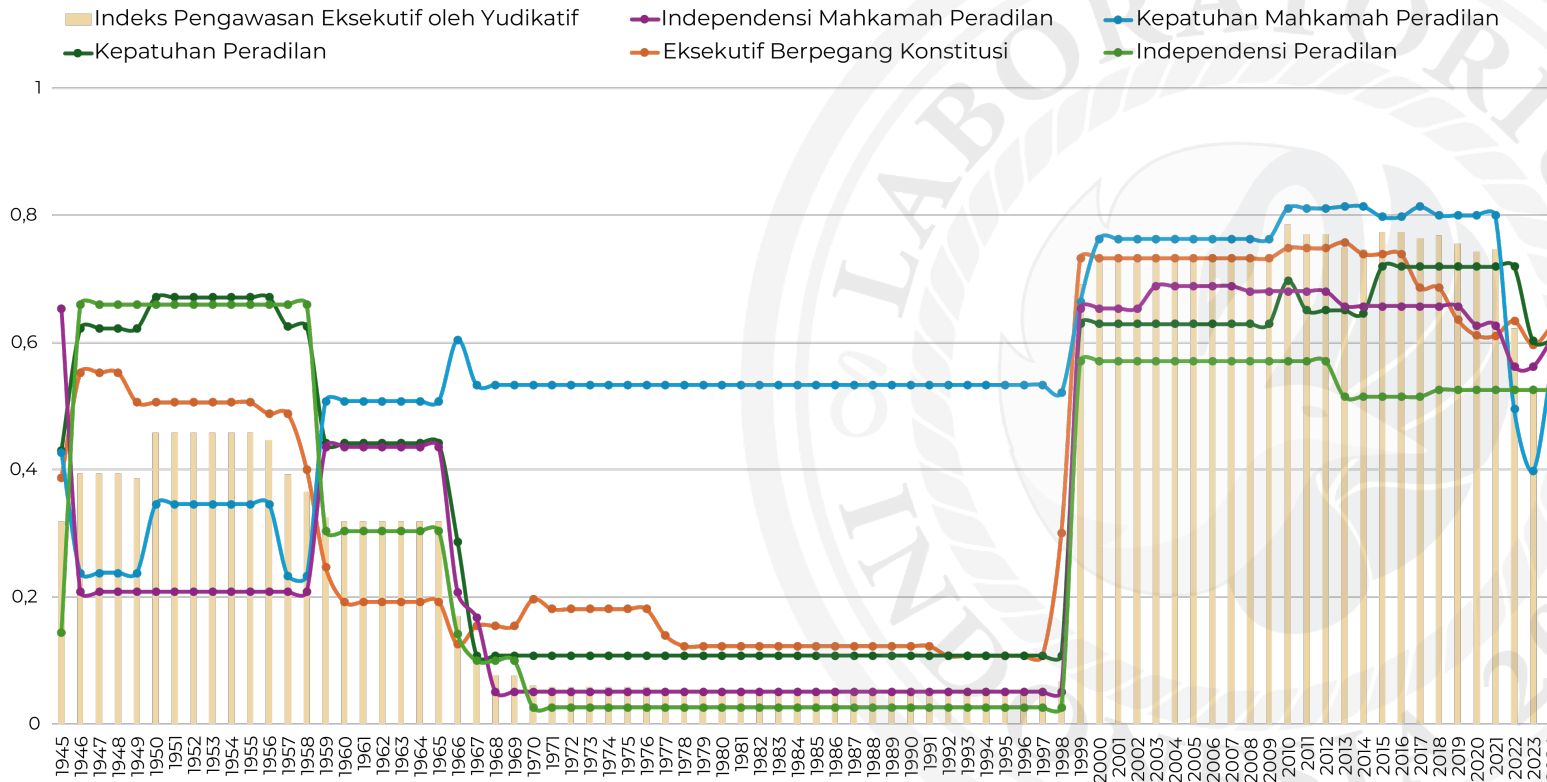
Ketiga, kebangkitan supremasi dan pelemahan kualitas parlemen pasca reformasi. Reformasi konstitusional dan struktural dilakukan mencakup amandemen UUD, keluarnya faksi ABRI dari parlemen, serta penguatan fungsi pengawasan dan legislasi. Parlemen memiliki peran dalam pemakzulan presiden dan pembuatan UU strategis. Namun, seiring dengan dominasi koalisi besar yang terbentuk mengakibatkan penyusutan deliberasi dan partisipasi publik meski formalitas institusional tetap terjaga.

Pola yang dihasilkan oleh indeks tersebut dapat dibagi menjadi tiga periode utama. Pertama, supremasi parlemen pada demokrasi parlementer. Indeks menunjukkan rerata cukup tinggi sebesar 0,46. Hal tersebut dipengaruhi cukup besar dari hasil pemilu 1955 mewakili semangat pluralisme, namun kontrol legislatif kurang berjalan efektif akibat instabilitas kabinet yang kerap terjadi.

Tren penguatan legislatif sangat bergantung pada struktur politik dan konteks transisi kekuasaan. Indeks menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka legislatif yang kuat secara formal, namun masih rentan secara praktik karena kooptasi politik.

Dinamika Pembangunan Pilar Yudikatif: Pilar Pengawas Supremasi Hukum

Tren Indeks Pengawasan Eksekutif oleh Yudikatif



Pola dari Indeks menunjukkan fluktuasi kinerja perimbangan yudikatif terbagi dalam tiga fase. Pertama, pseudo yudikatif independen pada awal kemerdekaan dan demokrasi parlementer. Indeks menunjukkan rerata nilai cukup baik sebesar 0,4. Penilaian tersebut mencerminkan posisi yudikatif yang secara normatif merdeka tetapi masih berada dalam bayang-bayang dominasi eksekutif.

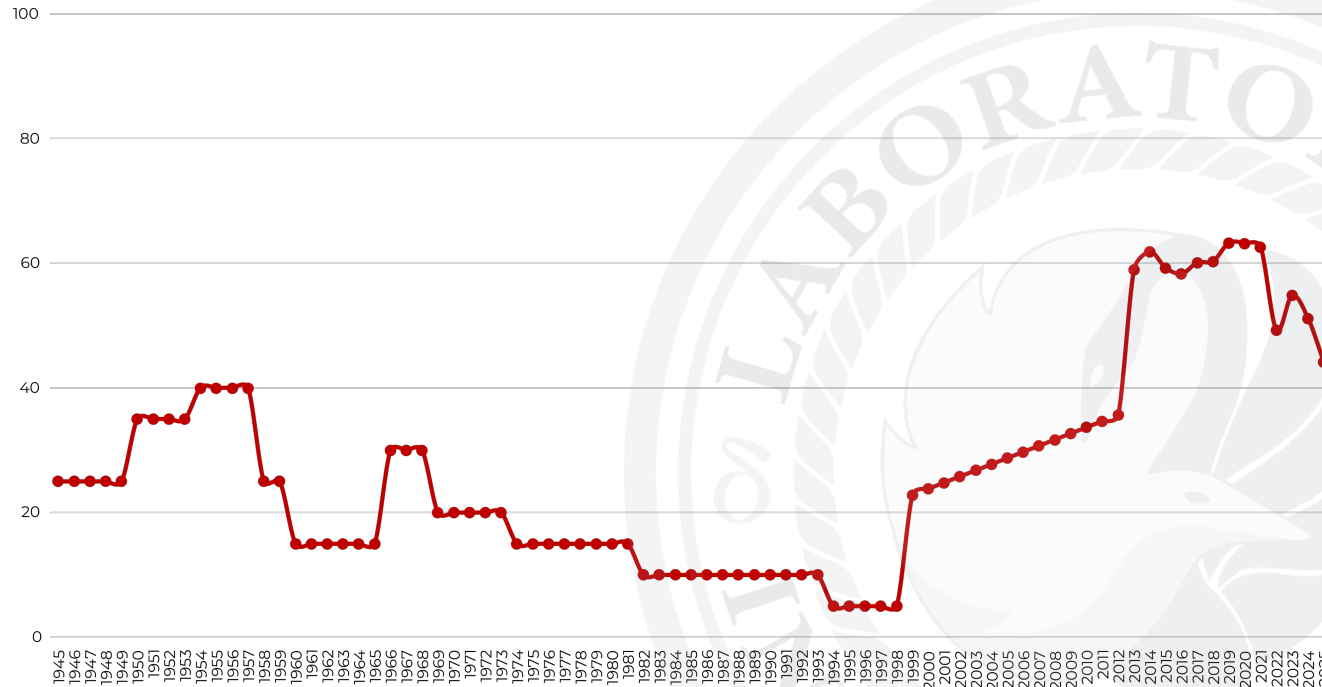
Kedua, pelemahan dan pembungkaman yudikatif ketika demokrasi dipimpin dan demokrasi pancasila. Skor sangat rendah dengan rerata nilai sebesar 0,2. Penurunan yang signifikan akibat subordinasi total MA di bawah Departemen Kehakiman dan hilangnya pengawasan terhadap eksekutif.

Ketiga, pemulihan kapasitas yudikatif. Pasca reformasi terdapat lonjakan tinggi dengan penataan ulang tata peradilan nasional melalui perubahan konstitusi. Selain itu pembentukan peradilan satu atap di bawah MA dilengkapi dengan MK dan KY menguatkan kapasitas yudikatif sebagai lembaga perimbangan.

Meskipun dalam perkembangan terkini terdapat tantangan kembali berupa pelemahan independensi, resistensi terhadap pengawasan KY, serta intervensi elite dalam perkara strategis. Kembalinya skema pelemahan kekuasaan yudikatif diterapkan sebagai dukungan legitimasi kebijakan eksekutif perlu diwaspadai ke depan.

Dinamika Pers atas Demokrasi: Pilar Pengawas Eksternal

Tren Indeks Kemerdekaan Pers



Tren indeks kemerdekaan pers mengonfirmasi narasi historis represi dan kebangkitan pers di Indonesia. Setidaknya terdapat empat fase dinamika perkembangan kebebasan pers. Pertama, adanya perkembangan positif pada awal kemerdekaan hingga demokrasi parlementer dengan pencabutan *Persbreidel Ordonantie* sebagai warisan kolonial. Upaya tersebut memberikan ruang bagi pers sebagaimana ditunjukkan pada peningkatan nilai indeks dari 25 menjadi 40. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dari pengaruh ideologi partai dan aliran.

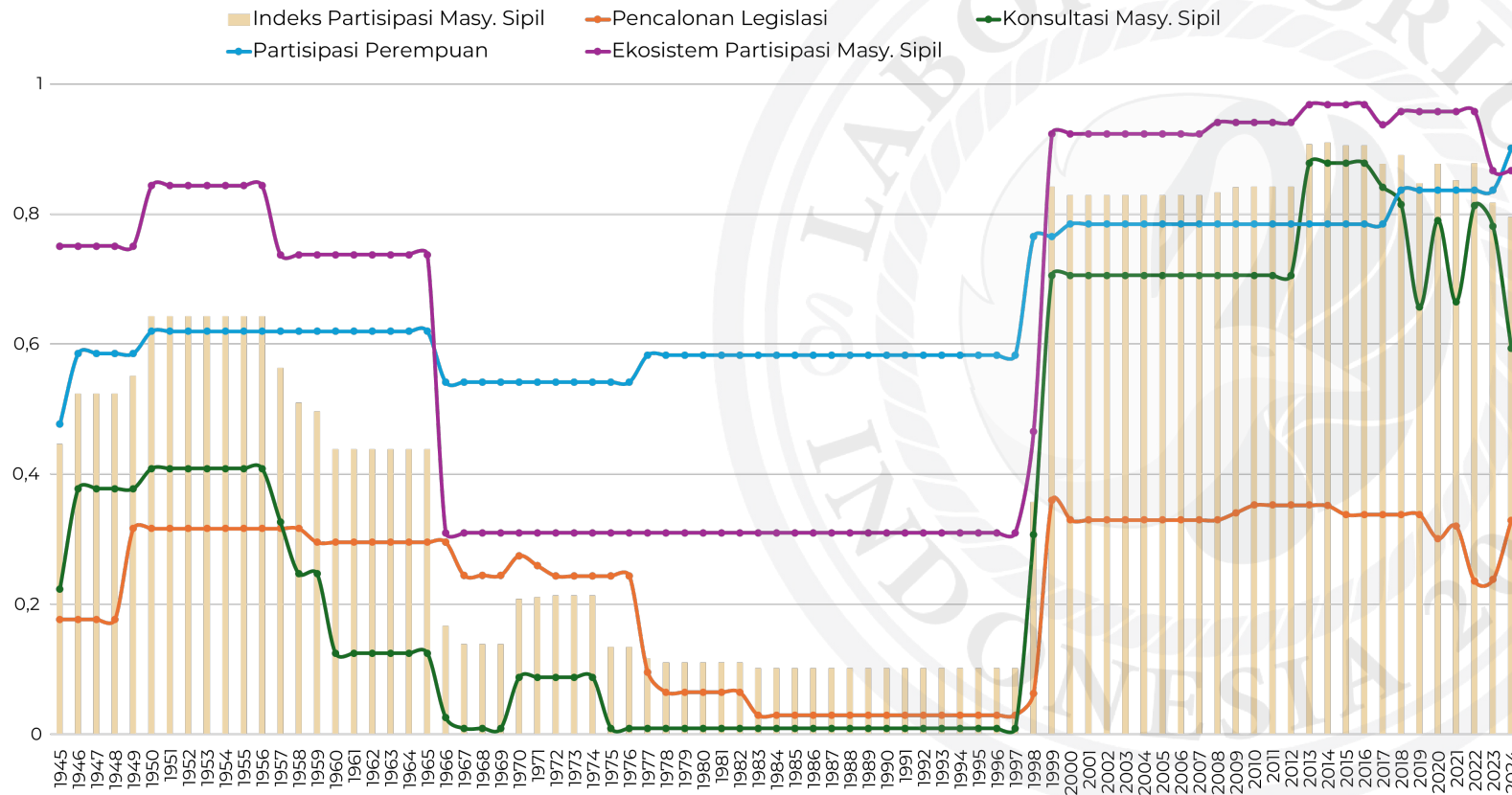
Kedua, penekanan independensi pers dengan penggunaan SOB yang menciptakan kebijakan-kebijakan represi atas nama kedaruratan negara oleh militer. Terbitnya Penpres No. 6 Tahun 1963 memperkuat kendali negara atas isi dan arah pemberitaan. Aksi penertiban direspons negatif oleh indeks sehingga nilai rerata pada demokrasi terpimpin hanya mencapai 15 dari 100.

Ketiga, meski terdapat perbaikan di awal periode demokrasi pancasila melalui UU No. 11 Tahun 1966 yang mengakui kemerdekaan pers, kondisi berbalik dengan terbitnya Permenpen No. 3/1969 memperkenalkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sebagai instrumen represi administratif. Setelah Peristiwa Malari 1974, pembredelan media dan pelarangan edisi semakin sering dilakukan. Fase ini merupakan kondisi terendah bagi independensi jurnalis dengan nilai rerata sebesar 15 selama hampir tiga dekade.

Keempat, pasca reformasi terdapat lonjakan signifikan bagi kemerdekaan pers Indonesia. Indeks menunjukkan pertumbuhan progresif dengan rerata nilai mencapai 41 selama 27 tahun. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 dan UU No. 40 Tahun 1999 menjamin kemerdekaan pers, menghapus sistem perizinan SIUPP, dan pembentukan Dewan Pers independen merupakan segelintir kebijakan penyehatan pers. Akan tetapi, pada era saat ini pers menghadapi tantangan yang sama bahkan bermutasi. Tantangan tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari pasar, algoritma digital, dan kooptasi politik. Oleh karena itu, reformasi hukum tidak cukup tanpa perlindungan jurnalis. Adanya kebutuhan transparansi kepemilikan media dan pembatasan-penertiban disinformasi yang dilakukan oleh buzzer.

Dinamika Masyarakat Sipil dalam Demokrasi: Pilar Penopang Terakhir

Tren Indeks Partisipasi Masyarakat Sipil



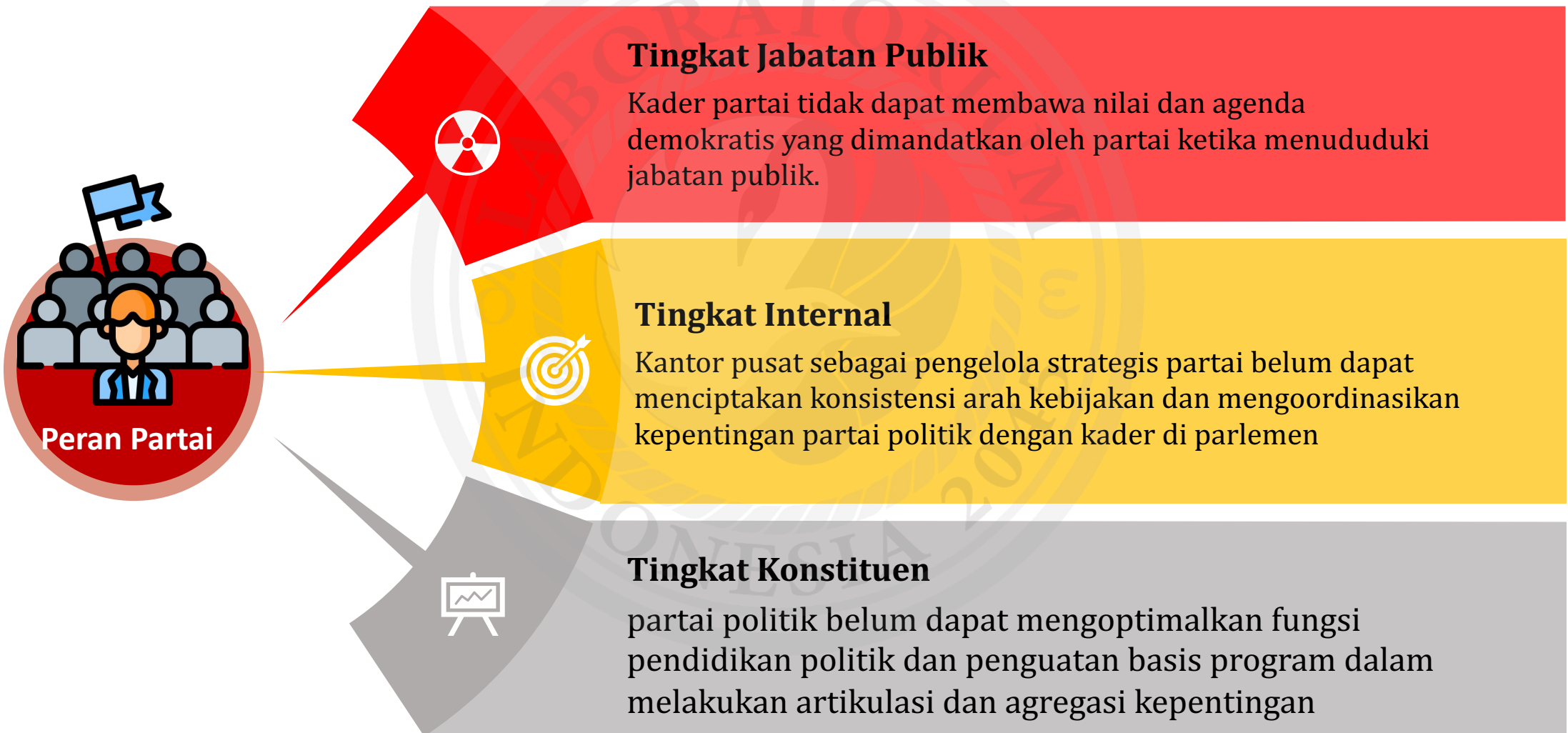
Masyarakat sipil adalah indikator demokrasi yang tidak bergantung pada lembaga formal. Sipil tetap berkembang bahkan saat parlemen lemah dan berada di bawah tekanan. Berdasarkan indeks partisipasi masyarakat sipil terdapat tiga pola utama dalam dinamika delapan dekade.

Pertama, ketangguhan sipil pasca kemerdekaan dan periode demokrasi parlementer. Indeks menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dengan dimulai dari titik 0,45 hingga memiliki rerata nilai 0,57 selama 15 tahun. Representasi masyarakat sipil kuat melalui saluran partai politik berbasis massa (NU, PKI, dan Muhammadiyah).

Kedua, fase pengurangan hingga penutupan keran partisipasi pada periode demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila. Indeks jatuh drastis dan stagnan pada rerata 0,28 akibat represi negara, pembubaran partai dan ormas, serta kebijakan massa mengambang. Negara mengatur OMS melalui legalisasi administratif dan kooptasi langsung.

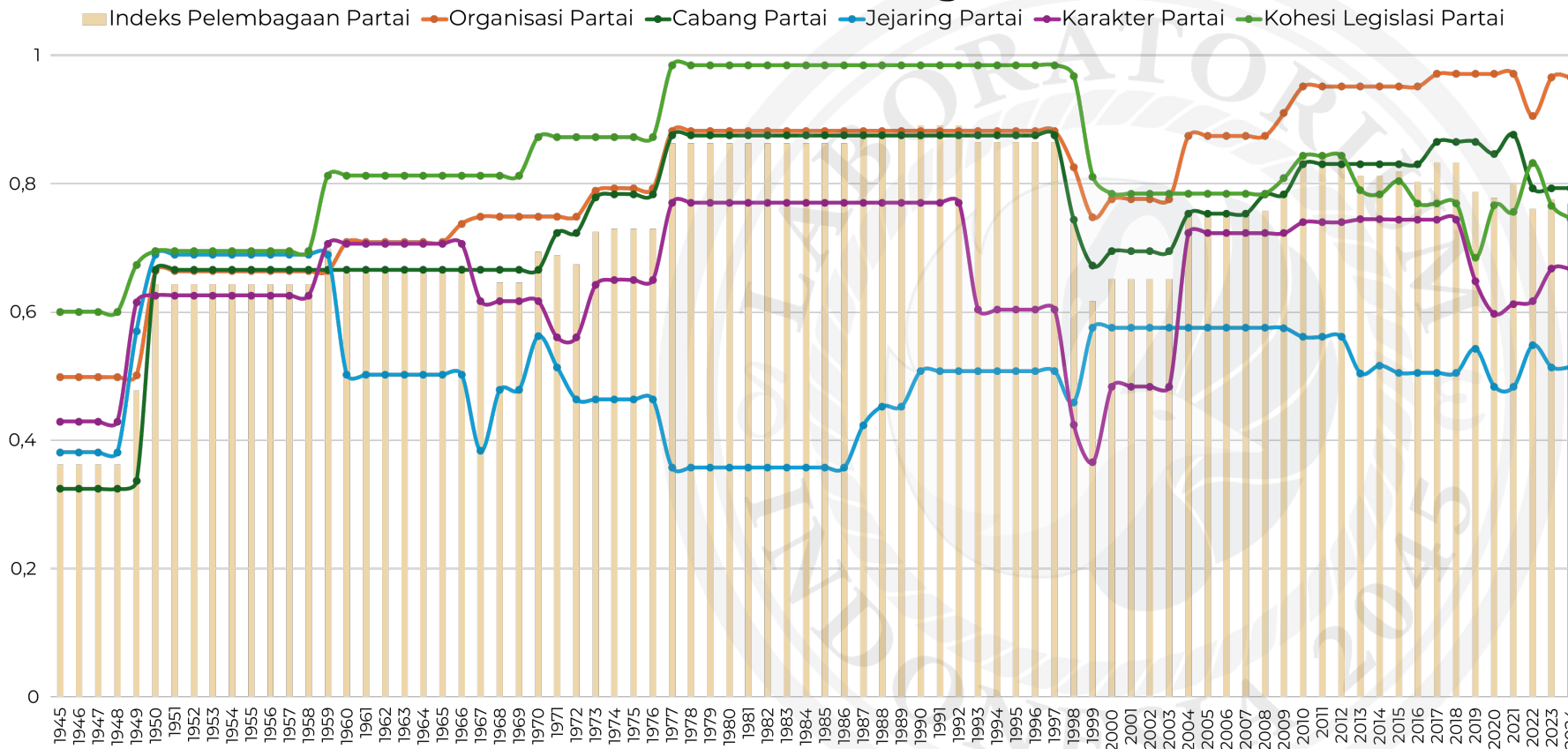
Ketiga, fase restorasi kapasitas masyarakat sipil dalam berdemokrasi pasca reformasi. Pertumbuhan OMS melonjak tajam dengan variasi fokus isu, seperti pendidikan politik, anti-korupsi, HAM, perempuan, hingga lingkungan. OMS memainkan peran kuat dalam mendorong legislasi, pengawasan, dan pembentukan wacana publik. Meskipun demikian, kini OMS kembali menghadapi tantangan seperti kooptasi OMS melalui pembatasan ruang gerak hingga pendanaan. Selain itu, terdapat pula fragmentasi internal OMS.

Pelemahan Pilar Demokrasi: Disfungsi Partai Politik



Refleksi 80 tahun Dinamika Pembangunan Partai Politik

Tren Indeks Pelembagaan Partai



Pada **Demokrasi Parlementer** indikator-indikator tumbuh koheren antara struktur partai masih konsisten antara pusat, cabang, kohesi dan ideologi. Sehingga periode ini menunjukkan **konsistensi struktur partai ideologis**, terutama partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sementara, pada **Demokrasi Terpimpin** terdapat stagnasi pada seluruh indikator kecuali **indikator jejaring partai**. Tren penurunan indikator jejaring partai berlanjut pada periode **Demokrasi Pancasila**.

Hubungan partai dengan pemilih semakin renggang meskipun tata lembaga meningkat, utamanya terkait kontrol partai terhadap anggota parlemen. Sedangkan, **rekalibrasi** terhadap pelbagai indikator terjadi ketika **transisi demokrasi pascareformasi**. Pembangunan ulang struktur organisasi, koherensi partai hingga relasi terhadap konstituen dimulai. Namun dalam beberapa tahun terakhir terdapat **perilaku pragmatisme partai** yang menciptakan **kartelisasi**. Posisi tersebut memperkuat posisi partai tapi membuat jarak dengan konstituen.

Tantangan Partai Politik sebagai Motor Penggerak Sosial-politik

Ketergantungan pada Pemodal Besar

Partai cenderung tunduk pada kepentingan tertentu mengalahkan kepentingan rakyat dan nilai partai.



Pemudaran Ideologi Partai

Kerentanan inkonsistensi dan praktik transaksionalisme partai tanpa adanya dasar nilai



Pragmatisme dalam Koalisi Politik

Hilangnya daya kritis partai sebagai corong artikulasi dan agregasi gagasan. Menurunkan kualitas pilar-pilar demokrasi.



Faksionalisme Nonproduktif

Pembentukan faksi partai yang cenderung mengarah pada konflik alih-alih kontestasi ideologi



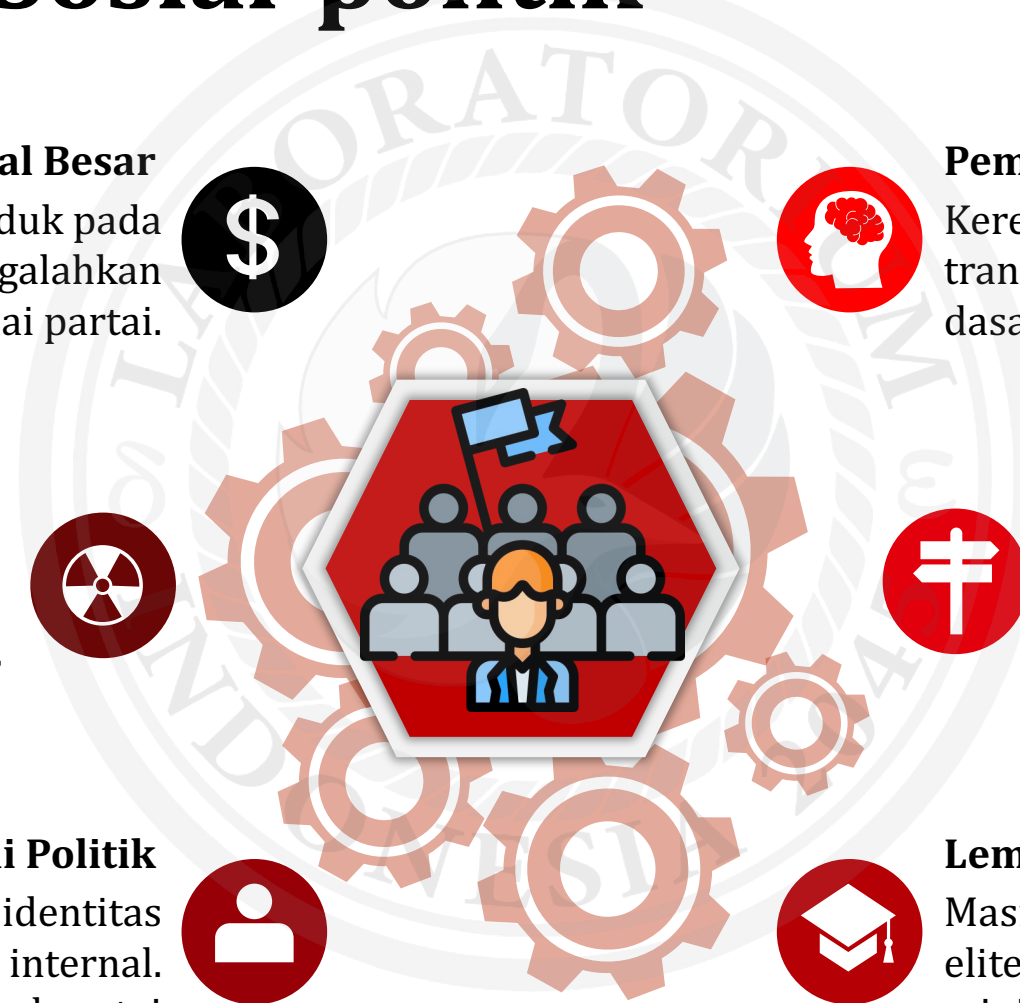
Personalisasi Partai Politik

Kompetisi ketokohan dan identitas partai berujung friksi internal. Melemahkan demokrasi internal partai dan mengaburkan nilai partai.



Lemahnya Kaderisasi-Pendidikan Politik

Masih kentalnya pengaruh dinasti dan elite dalam proses kaderisasi dan minimnya program edukasi politik bagi masyarakat



Pemetaan Pembangunan Skenario Demokrasi-Partai Politik

Kuadran Skenario Pembangunan Demokrasi dan Partai Politik

Demokrasi

Demokrasi Elitis

- Partai Politik Pragmatis
- Kontrol Kuasa Antarlembaga Terusik
- Hak Sipil Terjaga

Demokrasi Terkonsolidasi

- Partai Politik Profesional
- Kontrol Kuasa Antarlembaga Tinggi
- Hak Sipil Terpenuhi

Autokrasi

- Partai Politik Korup
- Kooptasi Kuasa Sentralistis
- Hak Sipil Tertekan

Otoritarianisme Kompetitif

- Partai Politik Profesional
- Kontrol Kuasa Antar Lembaga Minim
- Hak Sipil Terbatas

Demokrasi Terkonsolidasi

Partai politik berfungsi secara optimal yang berimplikasi atas keseimbangan antarlembaga negara. Adanya penjaminan ruang sipil yang luas dan terlindungi.

Demokrasi Elitis

Partai politik belum terlembaga baik dan rentan pragmatisme politik yang berdampak pada kontrol antarlembaga yang belum efektif. Meski demikian, ruang sipil relatif terjaga namun dengan peran yang terbatas

Otoritarianisme Kompetitif

Partai politik relatif kuat secara kelembagaan namun adanya penggerusan nilai demokrasi yang melemahkan independensi dan kontrol antarlembaga. Ruang sipil terbatas dan cenderung terkooptasi.

Autokrasi

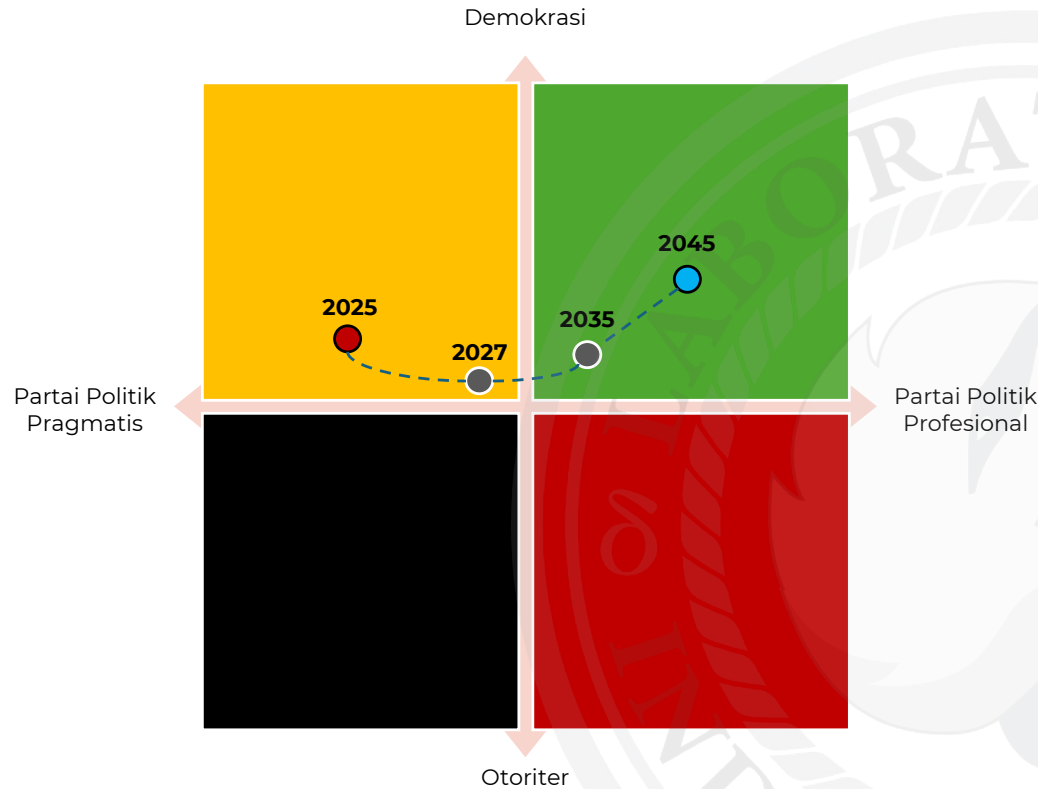
Demokrasi sepenuhnya terdegradasi fungsi partai politik lumpuh, terkooptasi oleh kekuasaan, dan tidak adanya kebebasan berserikat. Keabsenan kontrol-perimbangan antarlembaga membuat menekan ruang sipil dan menghilangkan saluran partisipasi publik.

Partai Politik Pragmatis

Partai Politik Profesional

Otoriter

Proyeksi Skenario Transformasi Partai Politik



Opsi Rekomendasi Kebijakan:



Variabel	Indikator	2025	2027	2035	2045
Partai Politik	Ekosistem	Lemah	Moderat	Berdaya	Berdaya
	Soliditas Internal	Moderat	Moderat	Tangguh	Tangguh
	Relasi Publik	Rapuh	Rapuh	Moderat	Solid
Demokrasi	Relasi Eksekutif-Legislatif	Kooptasi Eksekutif	Kooptasi Eksekutif	Kontrol Berimbang	Kontrol Berimbang
	Yudikatif Independen	Terbatas	Terbatas	Independen	Independen
	Ruang Sipil	Terjaga	Terjaga	Bebas	Bebas